Meninjau Kembali Nasionalisme Kita

Wendi Ahmad Wahyudi

Banyak hal-hal yang menarik menghiasi pertambahan umur Indonesia yang ke 72 tahun. Dimulai dari pertarungan DKI 1 yang mengarah pada menguatnya ego sektoral dan merebaknya isu SARA. Kejadian ini –disadari atau tidak– seperti mempertontonkan kemunduran yang begitu jauh hingga seperti berlari ke masa sebelum terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda. Selanjutnya muncul peristiwa penyerangan terhadap Novel Baswedan dan pembentukan Pansus hak angket KPK yang notabene ini cenderung upaya-upaya pelemahan terhadap KPK –walaupun cuitan FH tentang AR seyogyanya juga perlu dipertimbangkan. Selain itu juga muncul polemik terkait Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang bagi sebagian kalangan Perppu ini seperti menjadi senjata pemerintah untuk mematikan ormas-ormas yang akan mengganggu pemerintah, dan di pihak lain menyatakan bahwa Perppu tersebut hanya sekedar mempercepat proses hukum penanganan ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dari rentetan peristiwa tersebut, puncak dari penghantar menuju usia Indonesia yang ke 72 terjadi pada peristiwa upacara peringatan kemerdekaan yang dilaksanakan di Istana Merdeka yang dihadiri oleh mantan presiden dan wakil presiden Indonesia. Walaupun sebenarnya hal itu lumrah saja, namun tidak untuk sebuah peristiwa kehadiran dua mantan presiden yang sebelumnya tak pernah duduk bersama di momen upacara peringatan kemerdekaan ditahun-tahun sebelumnya. Itulah yang membuat peristiwa itu menghebohkan. Ditambah lagi dengan bumbu lain yang datang dari kubu yang memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah. Kubu ini melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan di Cibinong –yang boleh dikatakan sebagai upacara tandingan. Dua upacara ini seperti mentasbihkan persaingan dua kubu elit nasional yang kemungkinan akan bertarung di 2019. Itulah sedikit hiasan pengiring yang mewarnai perjalanan usia ke 72 tahunnya Indonesia.

Setelah kita dihantarkan oleh hiasan pengiring perjalanan Indonesia menuju 72 tahun, mari kita menelik ke Indonesia-nya bukan lagi tentang hiasan-hiasannya. Peringatan hari jadinya Indonesia seharusnya tak bisa dilepaskan dari sebuah proses introspeksi diri segenap warga negara Indonesia dan pemerintahnya, ketimbang hanya sebuah *ceremonial* belaka yang menjadi rutinitas tahunan kita. Layaknya sebuah proses introspeksi diri, terlebih dahulu kita harus mencari acuan yang menjadi tempat berpijak kita untuk melakukan introspeksi. Untuk itu mari kita kembali membuka sejarah bangsa ini, mulai dari munculnya ide kebangsaan (nasionalisme) sampai akhirnya memilih menjadi negara yang merdeka yang akan menjadi acuan kita untuk mengintrospeksi diri.

Munculnya Nasionalisme Indonesia

Menurut Benedict Anderson dalam bukunya “*Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*”, menyatakan bahwa nasionalisme di Indonesia (Hindia Belanda) merupakan salah satu gelombang terakhir dari nasionalisme. Kemunculan nasionalisme Indonesia merupakan gambaran yang rumit tetapi mempesona. Hal ini lebih-lebih karena ukuran kawasan ini yang relatif cukup luas– karena bentangan geografisnya mencakup ribuan pulau –dengan penduduk yang sangat banyak, dan spesies keagamaan yang beragam, serta kepelbagaian etnolinguistiknya. Melihat kondisi Indonesia tersebut, nasionalisme yang muncul di Indonesia sangat cocok dengan pengertian nasionalisme yang dikemukakan oleh Anderson yaitu,

sebuah komunitas politis yang dibayangkan atau terbayang sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lainnya. Namun, di benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka.

Selain hal tersebut, kemunculan nasionalisme Indonesia juga tak bisa dilepaskan dari dampak sistem kolonialisme yang diterapkan oleh Belanda. Hal ini dipertegas oleh Sartono Kartodirjo sebagai sebuah *counter ideology*. Perlu digaris bawahi agar kita tidak keliru bahwa nasionalisme sebagai sebuah ideologi tandingan merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem kolonialismenya Belanda bukan bentuk perlawanan ataupun kebencian terhadap orang-orang Belanda. Ini perlu ditegaskan karena kita terlalu sering keliru di ranah ini. Sejarah telah mencatat bahwa sebagian orang-orang Belanda pun juga menentang sistem kolonialisme tersebut. Hal ini dilakukan oleh kaum humanis Belanda, salah satunya yaitu Eduard Douwes Dekker atau yang lebih dikenal dengan nama pena Multatuli melalui karyanya “Max Havelaar”.

Kemudian dengan adanya persamaan nasib –kemelaratan- yang diakibatkan sistem kolonialisme yang mengeksploitasi masyarakat Indonesia sebagai pengikat, lalu ikatan tersebut diperkuat dengan sebuah cita-cita bersama yang akan menjadi tatanan ideal di masa depan setelah keluar dari sistem kolonialisme tersebut. Cita-cita bersama yang kemudian hari terwujud dalam bentuk Pancasila, UUD tahun 1945, dan tujuan kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD tahun 1945 dalam Alinea ke IV.

Nasionalisme Indonesia setelah Merdeka

Dalam sebuah negara yang merdeka, nasionalisme akan beralih bentuk dari sesuatu yang dibayangkan (ide) menjadi sesuatu yang harus diwujudkan (praksis). Yang kemudian disebut oleh Benedict Anderson sebagai sebuah “proyek bersama” (*common project*) untuk kini dan di masa depan. Dan proyek ini lebih membutuhkan pengorbanan pribadi, bukannya malah mengorbankan orang lain. Inilah mengapa tidak pernah terjadi pada para pejuang kemerdekaan bahwa seolah-olah mereka memiliki hak untuk membunuh sesama bangsa Indonesia. Sebaliknya mereka merasa harus memiliki keberanian jika nanti mereka akan dipenjara, dianiaya, dan diasingkan demi kebebasan dan kebahagiaan di masa depan para sesamanya.

Nasionalisme sebagai sebuah “proyek bersama” adalah sesuatu yang harus di tekankan oleh sebuah negara yang merdeka, sehingga tidak lagi muncul kekeliruan dalam berpikir bahwa nasionalisme adalah sebuah “warisan” semata. Ketika menjadi sebuah “warisan” semata, nasionalisme akan menjadi sebuah benda yang saling diperebutkan oleh orang-orang yang menyatakan diri paling berhak sebagai ahli waris yang tak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan untuk memenangkan warisan tersebut.

Sebagai sebuah “proyek bersama” –cita-cita yang telah dirumuskan dalam bentuk Pancasila, UUD tahun 1945, dan Pembukaan UUD tahun 1945 dalam Alinea ke IV– dalam proses pencapaiannya harus melibatkan seluruh masyarakat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke dengan menempatkannya sebagai subyek. Bukan malah menjadikannya sebagai obyek dari “proyek bersama” tersebut. Dengan artian hanya potensi sumber daya alam (SDA) daerahnya saja yang dilibatkan, sedangkan manusia yang mendiaminya hanya dianggap sebagai yang *lian* –sesuatu yang bukan bagian dari dirinya– sehingga sah-sah saja dilakukan penaklukan.

Jadi di sepanjang sejarah bangsa ini merdeka, hal yang wajar bila kita menemui cara-cara yang tidak *fair*, menghalalkan kekerasan bahkan saling bunuh dalam memperebutkan kekuasaan. Kalimat “Sayang ya, ada orang bla bla bla yang tinggal di daerah bla bla bla” menjadi hal yang tak asing bagi telinga kita, karena kita tak pernah benar-benar menjadikan nasionalisme sebagai sebuah “proyek bersama”.

Sebuah Perenungan

Di usia Indonesia yang ke 72 tahun ini yang boleh dikatakan kini tak muda lagi untuk usia seorang manusia, mari kita saling mengintrospeksi diri. Sudahkah kita benar-benar meninggalkan sistem kolonialisme yang menjadi alasan kita untuk merdeka? Masihkah birokrasi kita bergaya *ambtenaar*? Alasan apakah yang membuat kita masih berani untuk melakukan tindakan korupsi? Tak pernahkah kita benar-benar belajar dari sejarah runtuhnya VOC?

Tak pernahkah kita benar-benar ingin menjadi bangsa yang beradab? Yang tak harus menggunakan cara-cara yang tidak *fair*, menghalalkan kekerasan bahkan saling bunuh untuk sebuah kekuasaan. Masihkah cita-cita kemerdekaan yang dirumuskan oleh *founding father* bangsa ini tersimpan dalam ingatan kita? Atau hanya sekedar menjadi sebuah fosil belaka. Dan kapankah kita akan benar-benar serius menjadikan nasionalisme kita sebagai sebuah proyek bersama? Ataupun kita masih setia menganggap sebagian dari kita adalah yang *lian*.

Itulah beberapa pertanyaan yang harus kita jawab di usia ke 72 tahunnya Indonesia. Jawaban yang bukan hanya sekedar retorika belaka, tetapi sebuah jawaban yang harus menjadi tindakan nyata kita bersama. Dirgahayu Indonesia!!! (*)

Padang, 17 Agustus 2017